

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Nurwati (2008), kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Menurut BPS (2022) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan

yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Menurut Arsyad (2010), kemiskinan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang diukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Menurut Suryawati (2004), persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan Mempunyai pendidikan yang rendah. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.

3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*).
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Menurut Suwadi (2014), kemiskinan disebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya modal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
2. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Kedua yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu :

1. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit di jangkau.
2. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.
3. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

2.1.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menentukan besarnya penduduk miskin (Saleh, 2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar,

baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

2.1.3. Indikator Kemiskinan

2.1.3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Menurut Beik dalam penelitian Firstiana (2012), menjelaskan bahwa indikator kemiskinan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa macam indeks kemiskinan, yaitu:

1. *Headcount ratio*, yaitu ukuran yang menunjukkan persentase jumlah orang miskin dalam populasi.
2. *Poverty gap ratio (P1)* dan *income-gap ratio (I)*, yaitu ukuran yang menggambarkan selisih pendapatan rata-rata masyarakat miskin dengan garis kemiskinan.
3. *Sen index poverty (P2)* dan *FGT index (P3)*, yaitu ukuran yang menunjukkan distribusi pendapatan/pengeluaran diantara masyarakat miskin.

Lebih lanjut Beik dalam Firstiana (2012) menambahkan bahwa alat analisa kemiskinan yang moderat adalah *poverty gap ratio (P1)* yang digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan

garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Oleh sebab itu *poverty gap* disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Ukuran ini telah memenuhi prinsip anonimitas dan monotonisitas, tetapi belum memenuhi prinsip transfer atau sensitivitas distribusional. Nilai *poverty gap* berguna untuk menentukan target sasaran bantuan dan program karena menunjukkan biaya yang dibutuhkan dalam mengentaskan kemiskinan. Ukuran ini memperlihatkan seberapa banyak dana yang harus dimiliki untuk ditransfer kepada RTM sehingga pendapatan mereka naik di atas garis kemiskinan. Keadaan ini dapat terjadi jika tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Semakin kecil nilai *poverty gap*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan.

2.1.3.2 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran tentang distribusi pengeluaran oleh masyarakat miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar disparitas pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan digunakan untuk mengetahui keragaman pengeluaran masyarakat miskin di suatu daerah. Menurut Tambunan (2001), indeks keparahan kemiskinan menguraikan distribusi pengeluaran di antara orang miskin.

2.2 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati et al. (2021) membahas tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada sektor perdesaan di Provinsi Jambi tahun 2002-2018. Bertujuan untuk mengetahui kondisi kemiskinan pada sektor perdesaan dan perkotaan di Provinsi Jambi, mengetahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada sektor perdesaan dan perkotaan di Provinsi Jambi. Metode Analisis data yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis Korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 2002-2018 di sektor (daerah) perdesaan dari sisi jumlah (angka mutlak) lebih tinggi dibandingkan di sektor (daerah) perkotaan. Namun dari sisi persentase penurunan penduduk miskin di sektor perkotaan lebih tinggi di bandingkan sektor perdesaan. Kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2002-2018 cenderung mengalami peningkatan dan termasuk kategori pertumbuhan ekonomi sedang. Hasil analisis laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada sektor perdesaan menunjukkan nilai sig $0,025 < 0,05$. Kemudian hasil analisis laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada sektor perkotaan menunjukkan nilai sig $0,024 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada sektor perdesaan dan perkotaan di Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dongoran (2017) yang menganalisis Korelasi Pertumbuhan Ekonomi Dengan Angka Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2015 . Bertujuan untuk mengetahui korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan memanfaatkan software SPSS v.21. Penelitian ini menggunakan data PDRB, data pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2006- 2015. Data yang disajikan Badan Pusat Statistika (BPS) Sumatera Utara, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2006-2015 mengalami fluktuasi, dimana mulai naik pada tahun 2007, dan kemudian mengalami penurunan dua tahun berikutnya. Pada tahun 2010 sampai tahun 2011 kembali mengalami kenaikan namun sampai tahun 2015 terus mengalami penurunan. Sedangkan, angka kemiskinan provinsi Sumatera Utara secara umum terus menurun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2013, turun dan meningkat kembali pada tahun 2015 penurunan terus terjadi. Hasil uji hipotesis yang dilakukan terhadap kedua variabel (Pertumbuhan dan Kemiskinan) memperlihatkan bahwa nilai r_{tabel} dengan $df=(10-2)$ adalah 0.6319. Dan apabila dibandingkan dengan Pearson Correlation maka hasilnya adalah $r_{hitung} < r_{tabel}$. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hipotesis yang diterima adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.